

Berbeda dengan dana dari Pemerintah, realisasi pendapatan dari Dana Masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberhasilan upaya yang dilakukan IPB untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun demikian, upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, selain kondisi internal IPB. Pendapatan yang berasal dari Dana Masyarakat terdiri dari dana yang bersifat *restricted* dan dana yang bersifat *unrestricted*. Dana yang bersifat *restricted* terdiri dari pendapatan dari mahasiswa berupa Biaya Asrama Mahasiswa TPB, Deposit Asrama TPB, PPKM S-0, S-1, S-2/3. Selain itu, Dana Abadi dan dana kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat juga bersifat *restricted*. Selain pendapatan-pendapatan tersebut pada dasarnya bersifat *unrestricted*. Berdasarkan sifat kedua sumber pendapatan tersebut, revisi dilakukan terutama terhadap sumber dana masyarakat dan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Masyarakat tidak mengikat (*unrestricted*). Selain itu, revisi dilakukan terhadap anggaran pemerintah yang disebabkan adanya alokasi tambahan melalui APBN-P berupa ABT dan program Departemen Pendidikan Nasional yang berhasil didapatkan oleh IPB setelah RKAT 2006 disahkan yaitu Pengembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh berbasis ICT melalui skema INHERENT (K-2) Tahun 2006.

II. REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2006

A. REALISASI PENDAPATAN

Dari rencana awal pendapatan IPB tahun 2006 sebesar Rp 297,96 milyar sampai dengan September 2006 tercatat realisasi sebesar Rp 187,70 milyar atau 62,99 %. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber dana yaitu Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat.

1. Dana Pemerintah

Dari pagu Dana Pemerintah untuk tahun 2006 sebesar Rp 123,43 milyar sampai dengan September 2006 telah tercapai Rp 76,98 milyar atau 62,37 %. Dana Pemerintah terdiri dari komponen DIPA untuk Satker IPB maupun DIPA Departemen Pendidikan Nasional. DIPA IPB terdiri dari dana eks anggaran rutin dan eks anggaran pembangunan.

2. Dana Masyarakat

Pendapatan yang bersumber dari Dana Masyarakat dibedakan menurut kelompok masyarakat, yaitu dari peserta pendidikan langsung (mahasiswa) dan masyarakat lainnya. Sampai dengan September 2006, pendapatan berupa Dana Masyarakat baru mencapai 63,44 % (Rp 110.72 milyar) dari yang direncanakan sebesar Rp 174.53 milyar.

a. Dana dari Mahasiswa

Dana yang berasal dari mahasiswa dikelompokkan menjadi SPP dan Non SPP. SPP meliputi seluruh strata pendidikan baik reguler maupun penyelenggaraan khusus. SPP program sarjana (S-1) mencakup program sarjana *passing out* dan kurikulum mayor minor. SPP pada kurikulum mayor minor terdiri dari Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) dan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP). Dana Non SPP meliputi biaya untuk administrasi dan

keperluan mahasiswa baru, Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF), dan beasiswa. Sampai dengan akhir September 2006 dana yang bersumber dari mahasiswa tersebut telah mencapai Rp 78,81 milyar (86,89%) dari rencana sebesar Rp 90,70 milyar. Pendapatan dari SPP telah tercapai 93,59%, yaitu sebesar Rp 61,48 milyar dari rencana sebesar Rp 65.69 milyar.

b. Dana Masyarakat Lainnya

Dana masyarakat lainnya dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu: 1). Titipan dan Pendapatan Non Komersial, 2). Kerjasama PPM, 3). Usaha Komersial, dan 4). Pengembalian Piutang. Realisasi pendapatan dari Dana Masyarakat lainnya baru mencapai Rp 31,91 milyar dari Rp 83,82 milyar yang direncanakan atau sebesar 38,06%. Rendahnya capaian pendapatan dari Dana Masyarakat Lainnya terutama disebabkan belum terealisasinya pendapatan yang berasal dari Usaha Komersial dan belum semua realisasi pendapatan dari Kerjasama PPM tercatat. Dorongan dan monitoring terhadap kewajiban menggunakan rekening Rektor dalam pengadministrasian dana pendapatan setiap kegiatan kerjasama PPM masih belum sepenuhnya berhasil. Rencana awal pendapatan tahun 2006 dan realisasi pendapatan sampai dengan September 2006 disajikan dalam **Tabel 1**, sedangkan rinciannya disajikan dalam **Lampiran 1**.

Tabel 1. Rencana Awal Pendapatan Tahun 2006 dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan September 2006

No.	Sumber Pendapatan	Rencana Awal 2006		Realisasi Sept. 2006		Kemajuan (%)
		(Rp. x 1000)	(%)	(Rp. x 1000)	(%)	
A.	Posisi Awal Tahun	7.773.228	2,54	7.773.228	3,98	100,00
	1. Kas	7.269.941	2,38	7.269.941	3,72	100,00
	2. Piutang	503.287	0,16	503.287	0,26	100,00
B.	Pendapatan Tahun Berjalan	297.960.416	97,46	187.697.611	96,02	62,99
	1. Dana dari Pemerintah	123.433.693	40,37	76.980.583	39,38	62,37
	a. Eks Anggaran Rutin IPB	71.416.659	23,36	54.194.802	27,73	75,89
	b. Eks Anggaran Pembangunan IPB	36.507.034	11,94	16.360.536	8,37	44,81
	c. Eks Anggaran Pembangunan Depdiknas	15.510.000	5,07	6.425.245	3,29	41,43
	2. Dana Masyarakat	174.526.723	57,08	110.717.028	56,64	63,44
	a. Mahasiswa	90.702.155	29,67	78.810.689	40,32	86,89
	1). SPP	65.694.397	21,49	61.481.263	31,45	93,59
	2). Non SPP	25.007.759	8,18	17.329.426	8,87	69,30
	b. Masyarakat Lainnya	83.824.568	27,42	31.906.339	16,32	38,06
	1). Titipan dan Pendapatan Non Komersial	9.716.350	3,18	5.582.635	2,86	57,46
	2). Kerjasama PPM	64.380.000	21,06	24.010.618	12,28	37,30
	3). Usaha Komersial	5.900.000	1,93	-	-	-
	4). Pengembalian Piutang	3.828.218	1,25	2.313.086	1,18	60,42
	Jumlah Keseluruhan Penerimaan (A dan B)	305.733.644	100,00	195.470.839	100,00	63,94

Anggaran Kerjasama PPM baik yang melalui LPPM maupun Fakultas/Departemen bersifat *restricted* yaitu penggunaannya terbatas untuk kegiatan PPM, sedangkan anggaran yang berasal dari kontribusi usaha komersial merupakan andalan dalam menunjang manajemen IPB dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pembiayaan berbagai kegiatan yang bersifat pengembangan dalam implementasi IPB sebagai BHMN, kontribusi dari usaha komersial tersebut sangat diperlukan.

B. REALISASI BELANJA

Realisasi belanja dari Pemerintah sampai dengan akhir September 2006 adalah sebesar Rp 76,98 milyar atau 62,37 % dari rencana pengeluaran tahun 2006 sebesar Rp. 123,43 milyar. Mengingat mekanisme pencairan dana yang bersumber dari Dana Pemerintah adalah langsung dari Kas Negara dan tidak diperkenankan mengendap di IPB sebagai Satker maka realisasi pendapatan Dana Pemerintah adalah sama dengan realisasi belanja. Rencana awal belanja dengan Dana Pemerintah tahun 2006 menurut program kerja IPB dan realisasi belanja sampai dengan September 2006 disajikan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Realisasi Awal Belanja Dengan Dana Pemerintah Tahun 2006 dan Realisasi Belanja Sampai Dengan September 2006

No.	Belanja	Rencana Awal 2006		Realisasi Sept.2006		Kemajuan (%)
		(Rp.x 1000)	(%)	(Rp.x 1000)	(%)	
1.	Peningkatan Manajemen Institusi	33.762.265	27,35	25.601.249	33,26	75,83
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	78.773.606	63,82	49.733.374	64,61	63,13
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	1.374.672	1,11	869.191	1,13	63,23
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	1.369.112	1,11	-	-	-
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	841.680	0,68	-	-	-
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	2.983.130	2,42	45.772	0,06	1,53
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	3.059.517	2,48	730.997	0,95	23,89
9.	Pembangkitan Pendapatan	1.269.711	1,03	-	-	-
10.	Pengeluaran Non Program	-	-	-	-	-
Jumlah Anggaran Belanja dari Dana Pemerintah		123.433.693	100,00	76.980.583	100,00	62,37

Realisasi belanja dari Dana Masyarakat sampai dengan akhir September 2006 adalah sebesar Rp 94,23 milyar dari rencana pengeluaran tahun 2006 sebesar Rp. 170,15 milyar. Rencana awal belanja menggunakan Dana Masyarakat tahun 2006 menurut program kerja IPB dan realisasi belanja sampai dengan September 2006 disajikan dalam **Tabel 3**.

Tabel 3. Realisasi Belanja Dengan Dana Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan IPB Tahun 2006, Sampai Dengan September 2006

No.	Belanja	Rencana Awal 2006		Realisasi Sept.2006		Kemajuan (%)
		(Rp.x 1000)	(%)	(Rp.x 1000)	(%)	
1.	Peningkatan Manajemen Institusi	22.087.849	12,98	14.945.630	15,86	67,66
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	66.953.641	39,35	52.545.307	55,76	78,48
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	59.255.000	34,82	19.481.892	20,68	32,88
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	4.375.000	2,57	294.420	0,31	6,73
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	9.265.860	5,45	4.352.136	4,62	46,97
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	300.000	0,18	28.224	0,03	9,41
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	910.000	0,53	320.644	0,34	35,24
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	1.200.000	0,71	830.846	0,88	69,24
9.	Pembangkitan Pendapatan	25.000	0,01	13.000	0,01	52,00
10.	Pengeluaran Non Program	5.782.000	3,40	1.414.578	1,50	24,47
Jumlah Anggaran Belanja dari Dana Masyarakat		170.154.351	100,00	94.226.678	100,00	55,38

III. REVISI RENCANA KERJA

Rencana Kerja yang tercantum dalam dokumen RKAT 2006 pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara mendasar. Revisi rencana kerja perlu dilakukan terhadap RKAT 2006 karena adanya perubahan jadwal kegiatan I-MHERE dan adanya alokasi tambahan dana dari APBN. Kegiatan I-MHERE yang semula akan mulai bulan Agustus 2006 ternyata baru akan intensif dilaksanakan mulai bulan Desember 2006 sampai dengan Agustus 2007. Hal ini disebabkan proses persetujuan rencana kerja dan anggaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang lambat dan sampai dengan bulan September baru sampai tahap pengajuan anggaran untuk pelaksanaan rencana kerja kwartal pertama dari rencana empat kwartal. Selain itu, perubahan terjadi dalam peningkatan pendidikan melalui Teknologi Informasi Komunikasi (ICT), yaitu adanya peningkatan sehubungan dengan disetujuinya anggaran pengembangan pembelajaran jarak jauh melalui skema INHERENT (K-2) dan ABT 2006.

Revisi juga dilakukan terhadap rencana kerja yang dibiayai dengan Dana Masyarakat karena realisasi pendapatan diperkirakan lebih kecil dari rencana awal. Tanpa mengurangi esensi dari rencana kerja yang sudah disusun, beberapa kegiatan yang prioritasnya lebih rendah ditunda atau dikurangi alokasi dananya.

IV. REVISI RENCANA ANGGARAN

Revisi dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan September 2006 dan rencana pendapatan sampai dengan Desember 2006.

A. REVISI RENCANA PENDAPATAN

1. Dana Pemerintah

Revisi terhadap rencana pendapatan yang bersumber dari APBN sesuai dokumen DIPA Tahun 2006 dilakukan terhadap Komponen Administrasi Umum (eks anggaran rutin) yang mengalami peningkatan karena adanya kenaikan gaji pegawai. Rencana anggaran untuk komponen Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi (eks anggaran pembangunan) relatif tetap sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui pemerintah dalam DIPA dan RKAKL IPB 2006. Revisi juga dilakukan terhadap pendapatan dari APBN pada komponen DIPA Departemen Pendidikan Nasional karena beberapa hal, yaitu: (1) adanya keterlambatan program I-MHERE yang kemungkinan besar hanya akan dapat memanfaatkan anggaran maksimum sebesar Rp 3,4 milyar dari rencana semula Rp 6,2 milyar, (2) adanya anggaran tambahan melalui APBN-P (ABT) 2006 sebesar Rp 2,0 milyar, dan (3) adanya dana melalui skema INHERENT (K-2) sebesar Rp 2,0 milyar. Dengan demikian, anggaran pendapatan yang bersumber dari pemerintah menjadi Rp 141,10 milyar atau 114,31% bila dibandingkan dengan rencana semula sebesar Rp 123,43 milyar.

2. Dana Masyarakat

Revisi anggaran pendapatan yang berasal dari dana masyarakat dilakukan karena diperkirakan terjadi kenaikan pendapatan berupa SPP terutama sebagai akibat dari bertambahnya jumlah mahasiswa program diploma pada Direktorat Program Diploma yang menyelenggarakan pendidikan secara terpisah dari departemen dan peningkatan kontribusi mahasiswa baru dalam bentuk Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF). Selain itu, revisi pendapatan Dana Masyarakat dilakukan mengingat masih terdapat kesulitan dalam memonitor realisasi kerjasama PPM dan rendahnya realisasi kontribusi usaha komersial.

Dalam revisi RKAT 2006, pendapatan yang berasal dari SPP ditingkatkan, Non-SPP dan kerjasama diturunkan, sedangkan kontribusi dari usaha komersial sampai dengan Desember 2006, tetap diharapkan dapat direalisasi atau paling sedikit kewajiban PT BLST kepada IPB sehubungan dengan penggunaan dana dapat dikembalikan. Sebagaimana tercantum dalam RKAT 2006, pendapatan sebesar 50% dari rencana kontribusi Usaha Komersial dari PT. Indah Pesona Bogor (Ekalokasari Plaza), PT. Bogor Life Science and Technology dan PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri diharapkan dapat direalisasikan.

Pendapatan dari Dana Masyarakat direvisi menjadi sebesar 85,80% dari rencana awal, yaitu Rp 149,75 milyar dari rencana semula sebesar Rp 174,53 milyar. Rencana awal dan revisi rencana pendapatan Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat Tahun 2006 disajikan dalam **Tabel 4**.

Tabel 4. Rencana Awal Pendapatan Tahun 2006 dan Rencana Pendapatan Setelah Revisi

No.	Sumber Pendapatan	Rencana Awal 2006		Revisi 2006		Perubahan (%)
		(Rp. x 1000)	(%)	(Rp. x 1000)	(%)	
A.	Posisi Awal Tahun	7.773.228	2,54	7.773.228	2,60	100,00
	1. Kas	7.269.941	2,38	7.269.941	2,43	100,00
	2. Piutang	503.287	0,16	503.287	0,17	100,00
B.	Pendapatan Tahun Berjalan	297.960.416	97,46	290.854.300	97,40	97,62
	1. Dana dari Pemerintah	123.433.693	40,37	141.102.603	47,25	114,31
	1). Eks Anggaran Rutin IPB	71.416.659	23,36	87.557.702	29,32	122,60
	2). Eks Anggaran Pembangunan IPB	36.507.034	11,94	36.507.034	12,22	100,00
	3). Eks Anggaran Pembangunan Depdiknas	15.510.000	5,07	17.037.867	5,71	109,85
	2. Dana Masyarakat	174.526.723	57,08	149.751.697	50,15	85,80
	1). Mahasiswa	90.702.155	29,67	93.506.464	31,31	103,09
	a). SPP	65.694.397	21,49	69.960.328	23,43	106,49
	b). Non SPP	25.007.759	8,18	23.546.137	7,88	94,16
	2). Masyarakat Lainnya	83.824.568	27,42	56.245.233	18,83	67,10
	a). Titipan dan Pendapatan Non Komersial	9.716.350	3,18	8.431.152	2,82	86,77
	b). Kerjasama PPM	64.380.000	21,06	43.206.460	14,47	67,11
	c). Usaha Komersial	5.900.000	1,93	800.000	0,27	13,56
	d). Pengembalian Piutang	3.828.218	1,25	3.807.621	1,28	99,46
	Jumlah Keseluruhan Penerimaan (A dan B)	305.733.644	100,00	298.627.528	100,00	97,68

B. REVISI RENCANA BELANJA

Revisi rencana belanja kegiatan perlu dilakukan untuk menyeimbangkan rencana belanja terhadap rencana pendapatan setelah direvisi (*revised*) dan mengupayakan kenaikan posisi kas pada akhir tahun 2006. Rencana belanja kegiatan yang bersumber dari pemerintah adalah sesuai dengan dokumen perencanaan (RKAKL 2006) yang sudah disetujui pemerintah, dan dokumen kontrak hibah yang telah disetujui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sedangkan rencana belanja kegiatan yang berasal dari Dana Masyarakat disesuaikan dengan rencana pendapatan yang direvisi.

Pengurangan rencana belanja kegiatan dari rencana semula dilakukan pada kegiatan yang direncanakan akan dibiayai dari anggaran pendapatan usaha komersial, dan kerjasama PPM. Walaupun sebenarnya tidak ada *blocking* antar pos anggaran pendapatan dan belanja, tetapi untuk mempermudah dalam memahami keseimbangan pendapatan dan belanja dapat dikemukakan bahwa ada beberapa pos anggaran belanja yang akan dapat dilaksanakan bila ada pendapatan dari usaha komersial. Pos anggaran belanja yang baru antara lain adalah penelitian payung IPB, gaji tambahan/insentif bagi tenaga penunjang dan dosen berdasarkan kinerja, peningkatan kesejahteraan PNS dengan pemberian jaminan asuransi kesehatan tambahan selain Askes untuk PNS, pemberian THR untuk PNS dan tenaga honorer di unit utama institut yang sudah diinisiasi dan perlu terus dilanjutkan dengan dukungan kontribusi dari usaha komersial. Karena pendapatan dari usaha komersial sangat rendah maka sebagian dana BPIF digunakan untuk membiayai pos-pos anggaran belanja tersebut.

Rendahnya pendapatan dari kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat hanya berpengaruh terhadap volume kegiatan tetapi tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan manajemen institusi. Hal ini karena pendapatan tersebut diperlakukan sebagai pendapatan yang bersifat *restricted*.

Dalam revisi yang diajukan, rencana belanja diturunkan dari Rp. 293,59 milyar menjadi sebesar Rp. 283,7 milyar atau 96,63% dari rencana semula. Belanja untuk kegiatan yang dibiayai dengan Dana Pemerintah direvisi dari Rp. 123,43 milyar menjadi sebesar Rp. 141,1 milyar atau 114,31% dari rencana semula, sedangkan yang bersumber dari Dana Masyarakat direvisi dari Rp. 170,15 milyar menjadi sebesar Rp. 142,6 milyar atau 83,80% dari rencana semula. Rencana awal belanja tahun 2006 menurut kelompok program kerja dan rencana belanja setelah revisi disajikan dalam **Tabel 5**. Revisi rencana belanja menurut Kelompok Program Kerja dan berdasarkan sumbernya, yaitu Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat, masing-masing disajikan dalam **Tabel 6** dan **Tabel 7**, sedangkan rinciannya disajikan dalam **Lampiran 2**.

Tabel 5. Rencana Awal Belanja Tahun 2006 serta Rencana Belanja Setelah Revisi

No.	Belanja	Rencana Awal 2006		Revisi 2006		Perubahan (%)
		(Rp. x 1000)	%	(Rp. x 1000)	%	
A.	Program Kerja	293.588.044	96,03	283.699.973	95,00	96,63
1.	Peningkatan Kualitas Manajemen Institusi	55.850.114	18,27	60.380.842	20,22	108,11
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	145.727.248	47,66	157.314.066	52,68	107,95
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	60.629.672	19,83	43.376.782	14,53	71,54
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	4.375.000	1,43	302.000	0,10	6,90
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	10.634.972	3,48	7.546.321	2,53	70,96
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	1.141.680	0,37	705.823	0,24	61,82
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	3.893.130	1,27	2.853.838	0,96	73,30
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	4.259.517	1,39	5.391.447	1,81	126,57
9.	Pembangkitan Pendapatan	1.294.711	0,42	720.172	0,24	55,62
10.	Pengeluaran Non Program	5.782.000	1,89	5.108.681	1,71	88,35
B.	Posisi Akhir Tahun	12.145.600	3,97	14.927.555	5,00	122,91
1.	Kas	12.145.600	3,97	13.513.461	4,53	111,26
2.	Piutang	-	-	1.414.094	0,47	-
Jumlah Keseluruhan (A+B)		305.733.644	100,00	298.627.528	100,00	97,68

Tabel 6. Rencana Awal dan Revisi Belanja Program Kerja IPB yang didanai Pemerintah

No.	Program Kerja	Rencana Awal 2006		Revisi 2006		Perubahan (%)
		(Rp.x 1000)	(%)	(Rp.x 1000)	(%)	
1.	Peningkatan Kualitas Manajemen Institusi	33.762.265	27,35	40.834.332	28,94	120,95
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	78.773.606	63,82	90.180.449	63,91	114,48
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	1.374.672	1,11	1.374.672	0,97	100,00
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	1.369.112	1,11	911.497	0,65	66,58
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	841.680	0,68	460.823	0,33	54,75
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	2.983.130	2,42	2.427.564	1,72	81,38
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	3.059.517	2,48	4.218.093	2,99	137,87
9.	Pembangkitan Pendapatan	1.269.711	1,03	695.172	0,49	54,75
10.	Pengeluaran Non Program	-	-	-	-	-
Jumlah		123.433.693	100,00	141.102.603	100,00	114,31

Tabel 7. Rencana Awal dan Revisi Belanja Program Kerja IPB yang didanai Dana Masyarakat

No.	Program Kerja	Rencana Awal 2006		Revisi 2006		Perubahan (%)
		(Rp. x 1000)	(%)	(Rp. x 1000)	(%)	
1.	Peningkatan Manajemen Institusi	22.087.849	12,98	19.546.509	13,71	88,49
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	66.953.641	54,24	67.133.617	47,08	100,27
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	59.255.000	48,01	42.002.110	29,46	70,88
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	4.375.000	3,54	302.000	0,21	6,90
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	9.265.860	7,51	6.634.823	4,65	71,61
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	300.000	0,24	245.000	0,17	81,67
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	910.000	0,74	426.274	0,30	46,84
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	1.200.000	0,97	1.173.354	0,82	97,78
9.	Pembangkitan Pendapatan	25.000	0,02	25.000	0,02	100,00
10.	Pengeluaran Non Program	5.782.000	4,68	5.108.681	3,58	88,35
Jumlah		170.154.351	137,85	142.597.370	100,00	83,80

V. PENUTUP

Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun 2006 ini diharapkan dapat menjadi landasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan untuk tahun 2006. Revisi seperti ini tidak dapat dihindari karena besarnya pengaruh faktor eksternal terhadap realisasi pendapatan. Adanya ABT yang selalu muncul pada akhir tahun perlu diakomodasikan dalam revisi karena kepastian alokasi dana yang tercermin pada dokumen resmi keluar sesudah RKAT disahkan. Demikian pula, pendapatan dari kerjasama PPM yang setiap tahun sangat berfluktuasi perlu dipertajam perkiraannya pada revisi RKAT.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 November 2006

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa'id, MA.Dev